



Keluarga Istimewa

كُلُّ عَائِلَةٍ مُسْتَمِعَةٌ



BERMEDIA SOSIAL SECARA POSITIF

Hindari Kekerasan Berbasis Gender Online



Bersama membangun suasana yang nyaman bagi perempuan dan anak. Semua sektor/OPD/l lembaga harus membangun suasana itu.

Sri Sultan HB X Gubernur DIY

TELE KONSELING TESAGA

Tanya:
Hi kak TeSAGa, saya ingin konsultasi masalah teman saya. Jadi saya memiliki teman dekat sekali, panggil saja ZS. ZS mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jogja, ZS dikenal supel, baik, selalu ada ketika dibutuhkan oleh temannya, dan ZS memiliki banyak teman di kampus dan di luar kampusnya. Beberapa hari yang lalu salah satu teman ZS baru pulang dari rumahnya yang ada di Kalimantan. ZS dimintai temannya untuk menjemput di terminal sedangkan ZS sendiri tidak memiliki uang untuk membeli bensin. ZS merasa kasihan dengan temannya dan ZS juga tidak bisa menolak permintaan temannya apalagi meminta uang untuk dibelikan bensin. Akhirnya ZS meminta orang tuanya buat dikirimi uang untuk mengisi bensin kemudian menjemput temannya. Hal ini dilakukan ZS karena takut mengecewakan temannya atau temannya marah kepadanya hanya karena tidak dijemput, selain itu juga ZS merasa tidak enak kepada temannya. ZS selalu cerita pada saya kalau sebenarnya dirinya bingung bagaimana menghilangkan perasaan tidak enak, takut mengecewakan, dan kalau saya lihat ZS cenderung menghindari konflik dengan temannya dan ini yang membuat saya tidak tega melihat ZS. Boleh minta solusi bagaimana tindakan atau sikap yang seharusnya ZS lakukan untuk menghilangkan perasaan tidak enak kepada orang lain?

Jawaban:
Halo, terima kasih banyak sudah menghubungi TeSAGa. Berdasarkan apa yang kakak ceritakan, kami melihat bahwa teman kakak ini menjadi people pleaser. Sebenarnya hal yang bagus ketika banyak orang yang menyukai teman kakak karena selalu siap membantu temannya. Namun, dengan sifat dan sikap dari teman kakak yang merasa "ga enak" dan merasa bersalah jika tidak membantu, hal ini akan membuat dia merasa lelah baik secara psikis maupun emosional dan juga merasa tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Meskipun tidak mudah untuk berhenti menjadi people pleaser, namun patut dicoba sebagai upaya untuk menghargai diri kita sendiri. Yang perlu dilakukan adalah pahami bahwa diri kita memiliki pilihan, dan kita berhak memilih pilihan itu. Kemudian identifikasi prioritas kita. Ketika kita telah mengidentifikasi prioritas kebutuhan kita, dan lingkungan seperti apa yang kita inginkan maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengatakan "tidak" pada orang lain. Kita juga perlu membuat batasan untuk orang lain, hal ini adalah bentuk self-love. Kita tidak perlu mengiyakan semua permintaan dari teman kita, jika memang kita tidak mau dan tidak mampu. Mungkin awalnya akan ada teman yang berubah karena kita membatasi diri dengan mereka, dan namun pahami bahwa teman-teman yang mencintai dan selalu mendukung kita akan memahami diri kita. Belajar mengatakan tidak dengan keyakinan dan hindari memberikan alasan. Yang terakhir pahami bahwa diri kita juga membutuhkan kebahagiaan dari diri kita sendiri, bukan tugas kita untuk memastikan orang di sekitar kita bahagia.

Jika menemui / mengalami masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak silakan menghubungi hotline dibawah ini untuk menda-patkan perlindungan dan pendampingan dari tindak kekerasan. Layanan Puspaga dan UPT PPA dapat diakses secara GRATIS. Kontak dan Hotline Puspaga - UPTD PPA Yogyakarta

1. Puspaga Kenari (Kota Yogyakarta)
: Wa : 0811-2848-404, IG: puspagakenarijogja
2. UPT PPA Kota Yogyakarta : Wa : 08112857799
3. Puspaga Kesengsem (Kab. Sleman):Telp: 081910336614/ 081299064982/ 085643808677 email: puspagakesengsem.sleman@gmail.com IG: puspagakesengsem.sleman
4. UPTD PPA Sleman :Wa : 081328012054
5. UPTD PPA Kulon Progo:Telp.: (0274) 775229
6. UPTD PPA Bantul : WA dan SMS: 087738907000 Telp.: (0274) 367331
7. P2TPAKK Reksa Dyah Utami (DIY):WA: 08995006959

TIKAD dapat dipungki, perkembangan teknologi semakin maju dan pesat. Hal tersebut membawa banyak dampak baik bagi dinamika manusia baik itu dalam segi pendidikan, pekerjaan hingga akses komunikasi yang terbuka lebar. Salah satunya media sosial sebagai sarana berjejaring semakin luas. Namun jaring-jaring komunikasi tersebut juga dapat menimbulkan dampak yang negatif, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
Hal itu merupakan tindakan kekerasan berdasarkan aspek gender yang disebabkan ketidakadilan gender, difasilitasi teknologi dan internet dengan tujuan melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas tertentu. Berdasarkan Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2021, SAFEnet menerima 60 kasus pada 2019, meningkat menjadi 620 kasus pada 2020 dan di tahun 2021 sejumlah 677 kasus (Sanjaya dkk., 2022).
KBGO memiliki berbagai macam bentuk seperti :
• Pelecehan online (cyber harrastmen) : pelecehan melalui pesan, perhatian untuk menakuti/mengancam korban.
• Peretasan (cyber hacking) : mendapatkan dan mengubah informasi secara ilegal untuk merusak reputasi korban
• Pendekatan untuk memperdaya (online grooming) : membangun koneksi secara emosional untuk penyalahgunaan identitas pribadi korban

- Sexting : secara sengaja mengirimkan konten, pesan bernada seksual untuk mengikuti permintaan pelaku
- Malicious distribution : penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan korban
- Cyber stalking : menguntit dan mengawasi perilaku korban dengan mengamati atau menyusut jejak korbannya.

Beberapa kasus KBGO menyalahgunakan foto/video korban sebagai konten untuk memeras korban atau merusak reputasi korbannya bahkan dengan tujuan seksual. Hal ini perlu diwaspadai karena siapa saja berpotensi menjadi pelaku KBGO bahkan pelaku dapat datang dari orang terdekat yang telah dipercaya.
Lalu bagaimanakah dapat terhindar dari KBGO? Bijak dalam menggunakan internet dan bermedia sosial menjadi penting bagi masyarakat. Bermedia sosial secara positif dengan membuat batasan dalam bermedia sosial dianggap perlu seperti dengan berhati-hati dalam bermedia sosial. Memilah dan memilih konten yang akan diunggah di akun media sosial kemudian menyebarkan konten-konten yang bermuatan positif. Selain itu, jangan pernah untuk bertelanjang/tanpa busana di depan kamera untuk menghindari terjadinya penyebaran konten bermuatan seksual. Masyarakat juga perlu melindungi data pribadi di dunia maya. Hal tersebut dapat dilakukan

dengan mengunci akun pribadi, lakukan pilah dan pilih akun yang akan dijadikan teman di media sosial. Buatlah password yang kuat, kemudian jaga kerahasiaan password dan pin data yang ada di dunia maya.
Apabila menjadi korban KBGO, segeralah untuk dokumentasikan hal-hal yang terjadi. Ketika merasa tidak dapat menghadapi perilaku sendiri, ceritakan dan carilah bantuan untuk mendokumentasikan dan membuat kronologis kejadian. Kemudian hubungi bantuan melalui layanan seperti TeSAGa (Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga) dengan Nomor WA 087719292111 dan Instagram @tesagadiy. Selain itu dapat juga menghubungi UPT Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) DIY dan P2TPAKK Reksa Dyah Utami di Jalan Tentara Rakyat Mataram No 53 dan nomor telepon (0274) 5030707 atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A/UPTD PPA) yang ada di DIY. Korban juga dapat melaporakan kepada pihak berwajib dan penyedia layanan.
Tingkatkan bermedia sosial secara positif, gunakan media sosial secara bijak dan pahami bahwa apa yang dibagikan di dunia maya akan meninggalkan jejak digital selamanya. (*)-d

Menikahlah Ketika Sudah Siap !!

ANGKA pernikahan usia anak di Indonesia pada umumnya meningkat dari tahun ke tahun. DIY juga merupakan salah satu daerah dengan angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta mencatat sebanyak 757 dispensasi perkawinan dan pada 2022 tercatat sebanyak 597 dispensasi perkawinan.
Banyak faktor yang disinyalir menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia anak, di antaranya faktor ekonomi, saat masih ada anggapan bahwa menikahkan anak menjadi solusi untuk melepaskan diri dari kemiskinan; konstruksi sosial budaya yang berkembang di masyarakat, seperti munculnya anggapan bahwa jika perempuan pada usia tertentu belum menikah dianggap sebagai perawan tua, sehingga anak perempuan dinikahkan sejak dini untuk menghindari anggapan tersebut; dan kesehatan yang tidak dikehendaki (KTD) akibat pergaulan bebas dan seks pra nikah. Faktor lain adalah kurangnya pemahaman di bidang kesehatan, kurangnya pemahaman mengenai

peraturan pemerintah dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan internet dan media sosial yang tidak sehat memiliki andil dalam peningkatan pergaulan bebas di kalangan remaja, termasuk kekerasan dalam pacaran yang dikemas dalam bentuk toxic relationship.
Saat ini pernikahan usia anak masih dianggap sebagai hal yang biasa di masyarakat, bahkan dianggap sebagai alternatif penyelesaian masalah. Namun faktanya pernikahan usia anak menimbulkan berbagai permasalahan baru, Pernikahan usia anak akan menimbulkan berbagai dampak, diantaranya masalah kesehatan fisik, mental, ekonomi dan sosial.
Pernikahan usia anak meningkatkan risiko kematian maternal dan neonatal. Studi yang dilakukan oleh Adedokun et al (2016) mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen pernikahan dini pernah mengalami komplikasi sebelum dan sesudah melahirkan. Dikutip dari laman <https://genbest.id/articles/ perkawinan usia anak dapat meningkatkan risiko>

terhadap kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya karena organ reproduksi yang belum matang serta ketidaksiapan secara fisik dan mental. Faktanya sebesar 43,5 persen kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun dengan usia ibu 14-15 tahun, sedangkan 22,4 persen dengan rentang usia 16-17 tahun.
Pada umumnya pernikahan usia anak tidak diimbangi dengan kesiapan mental dan emosional. Belum adanya kematangan dalam hal kemampuan menyelesaikan konflik serta pemikiran masa depan yang belum matang dapat menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga hingga meningkatkan risiko perceraian.
Selain itu pernikahan usia anak juga rentan melahirkan keluarga miskin baru, dikarenakan rendahnya pendidikan yang menyebabkan sulitnya mengakses pekerjaan yang layak. Ketidaksiapan fisik, ekonomi, serta ketidaksiapan mental emosional dalam pernikahan dan pengasuhan anak akan memberikan dampak pada kualitas rumah tangganya. Sehingga bisa dikatakan bahwa fenomena pernikahan

usia usia anak akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Hal ini menjadikan fenomena pernikahan usia anak menjadi salah satu faktor utama penyebab lemahnya ketahanan keluarga yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Peran pemerintah dalam hal ini adalah memberikan pemahaman dan memfasilitasi masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak melalui berbagai macam program, di antaranya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, edukasi pra nikah, menyediakan layanan konseling dan pendidikan kesehatan reproduksi, penegakan peraturan / kebijakan pemerintah.
Upaya yang dilakukan pemerintah hendaknya juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang kuat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. (*)-d

Komitmen DIY Pascaraihan Penghargaan DRPLA

KOMITMEN Pemda DIY dalam melindungi perempuan dan anak mengantarkan meraih penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada daerah baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota yang memiliki sistem pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta menjamin perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI) Lenny N Rosalin SE MSc MFIn memberikan penghargaan PIMTI Perempuan 2022 pada Pemda DIY atas komitmennya dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk menduduki Jabatan Tinggi Pratama dan Madya (persentase perempuan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi sebesar 32,50 persen) beserta fasilitas yang mendukung perempuan untuk bekerja dalam rangka menerapkan kebijakan Pengarusutamaan Gender.
Hadirnya dua penghargaan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi sekaligus tantangan untuk terus meningkatkan upaya dalam

mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Sehingga, dapat terus terwujud DIY sebagai daerah yang adil gender, ramah terhadap perempuan dan layak bagi anak. Hal ini sejalan dengan arahan yang disampaikan oleh Gubernur DIY agar semua sektor / OPD / lembaga untuk membangun suasana yang nyaman bagi perempuan dan anak.
Berkaitan dengan arahan tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan agar dapat menyelesaikan target DIY membentuk seluruh kalurahan menjadi DRPLA sekaligus Desa Prima dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Dalam rangka menjawab tantangan di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY telah melaksanakan kegiatan penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) hingga tingkat desa.
Sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berkaitan langsung dengan masyarakat, pembentukan FPKK di tingkat desa ini dinilai dapat menjadi langkah yang strategis untuk melakukan pencegahan dan penjangkauan bagi perempuan dan

anak yang menjadi korban kekerasan di tingkat desa / kelurahan. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni 2022 dan dilanjutkan dengan kegiatan penguatan dan peningkatan pemahaman terkait dengan pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan yang dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2022.
Untuk mendukung kegiatan yang telah dilakukan di tahun sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY melalui bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menetapkan beberapa langkah yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2023, meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan di tingkat paling bawah seperti sekolah maupun keluarga serta meningkatkan profesionalisme lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak.
Sementara itu, untuk memastikan terlaksananya pelayanan yang baik bagi korban kekerasan akan dilakukan penguatan jejaring antar lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Tidak berhenti dengan upaya perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan FPKK dan lembaga layanan, DP3AP2 DIY menyiapkan mediator-mediator bersertifikat untuk

penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. DP3AP2 DIY memfasilitasi 4 peserta yang terdiri dari Kepala Balai UPT PPA DIY, 2 peserta dari P2TPAKK Reksa Dyah Utami, dan 1 peserta dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2 DIY.
Pelatihan mediator bersertifikat ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023 mendatang di Universitas Gadjah Mada. Melalui fasilitas pelatihan mediator bersertifikat diharapkan dapat membentuk karakter mediator yang andal khususnya dalam penanganan konflik pada perempuan dan anak.
Untuk memastikan terciptanya daerah yang adil gender, pada tahun 2022 DP3AP2 DIY telah melakukan berbagai kegiatan yang meliputi Pendidikan Politik untuk Perempuan, Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pengambilan keputusan, Advokasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Partai Politik, serta Webinar Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial dalam Bidang Politik. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik dapat membantu mengkomodasi suara-suara perempuan agar menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan yang memperhatikan kesetaraan gender. (*)-



Forum Anak Bantul (Fonaba)

PADA Januari 2023 kemarin, Forum Anak Bantul (Fonaba) mengadakan Open Recruitment dengan tujuan menjaring anak-anak di Kabupaten Bantul untuk menjadi pengurus baru periode 2023-2025. Sekira 65 peserta mendaftar dan mengikuti serangkaian kegiatan yang dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tes tertulis, wawancara tahap I dan wawancara tahap II.
Wawancara tahap I dilaksanakan secara online melalui aplikasi Google Meet yang diawali dengan materi dari Fasilitator Forum Anak Bantul, Prastowo. Materi tersebut membahas mengenai serba-serbi Forum Anak Bantul dan program dari

Fonaba.
Wawancara tahap II diselenggarakan di Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang dihadiri anggota pengurus Fonaba dan 34 peserta lolos pada wawancara tahap I.
Acara tersebut diemirahkan dengan serangkaian kegiatan yang bermanfaat, seperti pembekalan materi, diskusi, tukar kado silang, presentasi dan sharing antara pengurus dengan peserta. Di adakannya seleksi langsung tersebut dapat mengukur kemampuan dan pola pikir masing-

masing peserta yang akan menjadi bagian dari Fonaba. Sehingga nantinya mampu melaksanakan tugas serta tanggung jawab ke depan sebagai pengurus Forum Anak Bantul.
Banyak hal yang bisa dipetik dari serangkaian kegiatan tersebut, seperti menambah wawasan, pengalaman, relasi dan menyatukan ide-ide demi membangun Kabupaten Bantul ke ranah yang lebih baik lagi melalui bertumbuhnya generasi penerus di Fonaba. Seleksi juga bukan sebagai ajang baik dan buruk atau benar dan salah. Sebab semua merupakan anak-anak hebat yang sudah mau belajar dan usaha. (*)-d

Estafet Perjuangan Forum Anak Bantul

Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen

SEJAK undang-undang (UU) tentang affirmative action disahkan, terlihat sudah melewati tiga kali proses Pemilihan Umum (Pemilu) hingga saat ini. Akan tetapi di DIY, keterwakilan perempuan di parlemen masih belum bisa mencapai 30 persen. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya mencapai target tersebut, antara lain keraguan masyarakat kepada calon legislatif (caleg) perempuan. Selain itu terjadi sindrom queen bee, yaitu persaingan tidak sehat antara caleg perempuan. Serta masih adanya maskulinitas dalam diri partai politik (parpol).
Diperlukan strategi khusus untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Pertama, meningkatkan kapasitas caleg perempuan. Kapasitas yang dimaksud meliputi kemampuan public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum. Kemampuan lain yang diperlukan adalah pemahaman tentang isu gender dan pemberdayaan. Figur caleg perempuan

perlu diperkuat dengan berbagai soft skill dan pengetahuan yang luas tentang isu-isu pembangunan dan pemberdayaan agar mereka responsif terhadap keadaan masyarakat dan mampu merumuskan kebijakan untuk menyelesaikannya. Untuk itu diperlukan kesadaran dari caleg perempuan untuk lebih aktif mengikuti kegiatan yang membantu menambah kapasitas mereka dalam memahami isu-isu gender.
Kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen dan berusaha mengubah stigma negatif tentang pemimpin perempuan. Hingga saat ini masih dijumpai pandangan di masyarakat bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Adanya stereotip perempuan yang dianggap emosional, tidak rasional, dan tidak mampu mengambil keputusan merupakan salah satu faktor munculnya masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin perempuan.

Diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam kepemimpinan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan kesetaraan gender yang kopersif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan memasukkan muatan kesetaraan gender pada kurikulum institusi pendidikan.
Data Jumlah Caleg DPRD DIY Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Nomor Urut

No urut	Perempuan	Laki-laki
1	28 orang	27 orang
2	24 orang	30 orang
3	23 orang	32 orang
4	22 orang	30 orang
5	22 orang	32 orang
6	7 orang	6 orang
7, 8, 9 ... dst	134 orang	161 orang

Sumber: data diolah dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, 2019

Partai politik juga perlu lebih responsif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam proses pemilihan. Menurut penelitian Nadezhda Svedova, masih banyak partai politik yang didominasi oleh laki-laki. Hasil penelitian tersebut masih relevan dengan keadaan saat ini dimana masih dapat dijumpai kebijakan partai yang cenderung berkarakter 'maskulin'. Salah satunya penentuan nomer urut caleg dalam kertas suara seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Dilihat dari data tersebut, jumlah perempuan yang menduduki nomor urut awal (1, 2, 3) masih di bawah laki-laki. Padahal menurut penelitian dari Cakra Wikara Indonesia (CWI) pada tahun 2021, caleg dengan nomor urut awal (1, 2, 3) memiliki potensi terpilih lebih besar. CVI sendiri merupakan perkumpulan

peneliti sosial politik dengan perspektif gender. Untuk itu perlu diperlukan kesadaran dari pengurus partai untuk lebih responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender dan mengubah kebijakan mereka yang masih bersifat maskulin.
Memberikan kuota lebih banyak kepada perempuan untuk menjadi caleg partai dapat menjadi salah satu strategi meningkatkan responsifitas partai. Pada 2023 ini, kegiatan politik akan semakin tinggi intensitasnya, sehingga ini menjadi waktu yang tepat untuk menerapkan beberapa strategi di atas guna meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen.
Kesadaran dan komitmen para stakeholder menjadi salah satu kunci utama dalam kesuksesan strategi-strategi tersebut. Tidak boleh lagi ada diskriminasi dalam proses pencalonan dan pemilihan caleg antara laki-laki dan perempuan. Dengan begitu diharapkan pada tahun 2024 Indonesia akan mencapai kuota afirmatif 30 persen. (*)-d